



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan

PEMOHON

1. Partai Demokrat (Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 10.25 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ananthia Ayu
Hersinta Setiarini**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Bahrum Daido

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Natalia Saetapi

C. Pemohon Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Ilyas

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Jufri Hafid
2. Andi Hasrun
3. Syahroni

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Nuzul Wibawa
2. Mulyadi Marks Phillian
3. Diprpto Tobok Pakpahan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Angga Brata Rosihan
2. Tantri Maulana
3. Muslimin Mahmud

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Parulian Siregar
2. Noak Banjarnahor
3. Irvan Maulana

H. TERMOHON:

1. Viryan Azis
2. Misna Attas
3. Upi Hastati

I. Termohon:

1. Dipo Lukmanul Akbar
2. Tito Prayogi
3. Dedi Mulyana
4. Muhammad Mukhlasir
5. Remana Nugroho
6. Eli Sunarya

**J. Pihak Terkait Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019:**

Jamaluddin Rustam

K. Bawaslu:

1. Ratna Dewi P.
2. Asril Yusuf
3. Amrayadi
4. Laode Arumahi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.25 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan untuk kloter kedua dari persidangan masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan ini. Dan kali ini adalah partai yang akan ... yang mengajukan permohonan Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat. Kemudian, Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari partai gerak ... Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Empat, untuk Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu dari Partai Persatuan Pembangunan.

Terlebih dahulu, silakan Saudara Pemohon masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Partai Demokrat, siapa yang mewakili? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Natalia Saetapi dari DPW Partai Demokrat. Saya hadir bersama Prinsipal kami, Dr. Ir. Bahrum Daido. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, dari Partai Gerindra? Apakah sudah hadir? Bapak yang baru datang dari Gerindra? Oke, silakan duduk dulu, Pak! Kalau begitu nanti, saya silakan duduk dulu. Yang lain, dilanjutkan dulu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah sudah hadir? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat Pagi. Kami Pemohon yang hadir Kuasa, Dipranto Tobok Pakpahan sebelah kiri. Saya, Yang Mulia, Marks Phillian. Kemudian sebelah kanan, Muhammad Nuzul Wibawa. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dari Partai Persatuan Pembangunan? Miknya, Pak. Biar terekam di ininya. Nanti suara bagus Bapak enggak terekam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Dari Pemohon, Partai Persatuan Pembangunan, yang hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Muslimin Mahmud dan rekan kami berdua belum masuk.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Bapak Kuasa, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Ya.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Baik, dari Gerindra, siapa, Pak? Mohon memperkenalkan diri saja terlebih dahulu. Dihidupkan miknya, Pak!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Gerindra yang hadir ada berdua, Kuasa Hukum, dan satu orang Pihak Prinsipal dari Kabupaten Maros.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipal hadir?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ada, Prinsipal kabupaten (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipal, siapa namanya, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Nama saya Jufri Hafid, S.H., M.H. rekan saya, Andi Hasrun, S.H. dan Pihak Prinsipal adalah Muhammad Ilyas, S.H.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari Termohon, silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Selamat Pagi. Perkenalkan saya sendiri adalah Dipo Lukmanul Akbar beserta rekan saya di belakang adalah Remana Nugroho, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Termohon dihadiri Prinsipalnya Bapak Viryan.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk permohonan nomor berapa?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk permohonan Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan permohonan Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Permohonan 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan permohonan nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia!

28. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Kami dari Termohon hadir Komisioner, Bapak Viryan, seperti tadi sudah disebutkan dan juga didampingi oleh Ibu Misna Attas dan Ibu Upi Hastati dari KPU Republik Indonesia. Kami sendiri dari Kantor Absar Kartabrata mewakili perkara permohonan Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra. Saya sendiri, Dedi Mulyana dan di belakang ada rekan saya, Ibu Eli Sunarya. Demikian, dilanjutkan rekan saya.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, masih ada Kuasa Termohon yang lain? Silakan!

32. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Tito Prayogi dan di belakang saya ada rekan saya, Muhammad Muhklasir. Kami adalah Kuasa Hukum Termohon dalam perkara nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, terima kasih.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perkara nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, PDI Perjuangan.

Ya, Pihak Terkait, siapa saja yang hadir? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Saya sebagai Pihak Terkait Dapil Sulsel III, Muhammad Dhevy Bijak, Partai Demokrat. Yang hadir, Kuasa Hukum, Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.

Majelis, kami sekaligus akan menyerahkan Surat Kuasa tambahan.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti. Mohon Petugas nanti diambil, ya! Bapak, Pihak Terkait untuk perkara nomor berapa?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dari Partai Demokrat, ya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Ya.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Silakan dilanjutkan! Pihak Terkait?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami hadir di sini 2 orang. Saya sendiri Parulian Siregar bersama rekan saya, Noak Banjarnahor. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu masihkah seperti yang dulu?

44. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Ada pergantian Bawaslu Sulselnya, Pak Ketua.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ada pergantian Bawaslu Sulsel. Silakan, Ibu!

46. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

48. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Bawaslu hadir saya, Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Hadir Bawaslu Sulawesi Selatan, Ketua, Bapak Laode Arumahi. Anggota Asril Yusuf dan Amrayadi. terima kasih.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Semua Pihak sudah memperkenalkan diri. Walaupun beberapa di antaranya memang sudah terkenal. Dengan demikian, maka kita mulai untuk permohonan dari Partai Demokrat. Silakan! Dari Kuasa Hukum Partai Demokrat untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu semuanya dibacakan, cukup poin-poinnya saja. Yang bersifat tabel atau uraian yang merinci poin itu tidak perlu dibaca lagi karena kami dan kita semua juga sudah menerima perbaikan permohonan Saudara. Kami alokasikan waktunya kira-kira kurang lebih 10 menitlah. Silakan, ibu Natali!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP Partai Demokrat, bersama Prinsipal saya Dr. Insinyur Bahrum Daido. Berdasarkan perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan yang bertandatangan di bawah ini Ketua Umum kami Prof. Dr. Hj. Susilo Bambang Yudhoyono (...)

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang itu, ndak usah dibacakan lah!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Penyerahan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, dianggap dibacakan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyelesaikan pemilihan umum secara nasional ke Mahkamah Konstitusi dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan adalah:

Bahwa perolehan suara di Dapil Sulawesi Selatan III meliputi 9 kabupaten, antara lain, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidrap. Bahwa kesembilan kabupaten di atas, ada berbagai masalah serius yang akan ... yang mau Pemohon dalilkan sebagai berikut.

Di sini ada angka-angkanya kami anggap di ... sudah dianggap dibacakan. Ya.

Bahwa perolehan sesama Partai Demokrat, di sini ada dugaan untuk Caleg Nomor 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak, melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Luwu sebanyak 40.000 suara. Bahwa penggelembungan ... dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Nomor 7 di 6 kecamatan. Tetapi yang paling masif ada di dua kecamatan, di Kecamatan Wan ... Walenrang Barat dan Walenrang dengan jumlah suara=16.215 suara. Jadi, seharusnya Caleg Nomor 7, suara seharusnya=23.870 suara, bukan 40.085 suara. Kami sudah lampirkan dalam bukti kami.

Bahwa perolehan suara Nomor Urut 2, Prinsipal kami, Bahrum Daido. Di lima kecamatan. Kecamatan Lamasi, Kecamatan ... Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang, sebanyak 1.707 suara. Seharusnya, 8.736. ini data ini kami peroleh berdasarkan saksi orang yang kami tempati di sana. Mereka sudah berhitung sendiri.

Bahwa hasil perhitungan suara masing-masing Caleg Kabupaten Luwu, Pemohon adalah sebagai berikut.

Saya hanya bacakan Pemohon saja. Bahrum Daido=21.836 suara. Jadi total perolehan suara masing-masing Caleg di Dapil Sulsel III seharusnya Bahrum Daido=38.090 suara, Yang Mulia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Termohon, berkaitan dengan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Caleg Nomor 7, Muhammad Dhevy Bijak.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon memperoleh perolehan suara Pemohon Dr. Insinyur Bahrum Daido sebanyak

38.090 suara dan menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel III.

Itu isi dari Posita dan maupun Petitumnya, Yang Mulia.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Mungkin ada catatan? Dari Yang Mulia? Ada (...)

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Catatan redaksi. Tapi penting, ya? Itu di (...)

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu yang, kan nanti, itu belum semua kan? baru sudah semua?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Izin, Yang Mulia. Hanya ini. Jadi, izin, Yang Mulia. Seharusnya ada permohonan yang rupanya tidak termasuk. Jadi kalau kami, dilihat dari daftar bukti yang sudah kami kirim. Kami ada satu caleg lagi di bukti P-1 sampai P-16. Tapi sudah kami masukkan daftar buktinya. Ternyata saat kami cek di permohonan masuk ke MK, itu tidak masuk.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang Anda, yang (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Jadi ... jadi yang akhirnya, karena kami ... karena kami tidak mungkin ada perbaikan, kan?

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

He eh. Jadi, hanya Caleg Nomor 7, tetapi bukti tetap kami masukkan karena kami diberi tahu bahwa memang ini dalam satu dapil di

dalam 9 kabupaten itu. Khususnya di tiga wilayah ini. Di Kabupaten Toraja Utara (...)

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Kabupaten Luwu, Kabupaten ... eh, Kecamatan Walenrang dan Walenrang Barat. Memang ada dugaan penggelembungan suara.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kan, tadinya aslinya tiga, tetapi kemudian itu bolehkah kami mengatakan bahwa yang lainnya kemudian lalu tidak ... tidak dimohonkan lagi, begitu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Kalau ... kalau kami mohon untuk pertimbangan, Yang Mulia. Ex aequo et bono dari Yang Mulia. Kalau memang ini boleh menjadi dasar memang ada dugaan kecurangan, ya kami mohon menjadi bahan pertimbangan.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Kan, ini yang tadi Ibu sampaikan itu kan, sudah ... sudah selesai dengan yang anu itu, kan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, berarti kan yang ... yang lainnya tidak ada relevansinya lalu lagi, kan? Begitu, kan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Izin, Yang Mulia. Apakah Prinsipal kami diizinkan bicara?

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipal ini bentuk prinsipal yang mana?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Prinsipal langsung, Bahrum Daido.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, itu ... ya yang ... itu yang sudah Ibu bacakan tadi, kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, sudah dibacakan.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sudah dibacakan tadi, apa lagi yang mau disampaikan? Boleh saja sih, cuma mau menegaskan apa lagi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya. Izin, Yang Mulia. Ini kan, memang perkara internal. Kami juga sudah mengajukan langsung kepada (...)

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu dia persoalannya, makanya saya tanya (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, ya, sudah langsung ke ketua kami (...)

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu dia persoalannya (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, sudah ada surat terlampir kami masukkan juga sebagai bukti ... sebagai bukti tambahan. Maksudnya memang di dalam 9 kabupaten ini, di sini kami masukan dalam P-19. Jadi, tidak hanya ... sebenarnya tidak hanya di Caleg Nomor 7 karena berikutnya yang kami masukkan di bukti bulan Juni ... surat masukkan lagi kepada DPP, memang ternyata ada caleg lainnya yang kami masukkan dalam lampiran Kabupaten Toraja Utara juga, di situ juga ada dugaan-dugaan penggelembungan, Yang Mulia. Tetapi khusus untuk (...)

81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi khusus untuk yang (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Yang kami masukkan Caleg Nomor 7 (...)

83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Ibu bacakan tadi itu (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya.

85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang untuk yang caleg?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Nomor 7.

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itu yang saya maksudkan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ibu kan, tidak mewakili yang lain, kan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Tidak. Saya hanya mewakili (...)

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itulah yang saya tanyakan. Jadi karena itu menyangkut internal, siapa tahu misalnya nanti sudah ada persoalan kebijakan internal partai. Kan, kami tidak boleh ikut campur ke situ, kan? Ya, kan? Karena ... Ibu punya kuasa untuk yang lain juga? Ndak, kan?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Kalau kami dari kuasa kami untuk mewakili caleg-caleg dari Partai Demokrat. Cuma dalam hal ini, saya mewakili Bahrum Daido.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ya itulah kami. Itu kan, banyak itunya. Tapi khusus untuk Ibu tadi kan, mewakili Nomor 7, kan? Tidak bisa mengatasnamakan yang lain kan, begitu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Tetapi pada dasarnya kan, ini berkaitan, maksud saya. Jadi, Yang Mulia (...)

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tahu kami berkaitan karena itu DPP yang membuatkan ininya, kan. Maksudnya begitu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kan, ini menunjuk pada orang tertentu, kan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tadi dan yang Ibu bacakan pun yang berkait dengan Caleg Nomor 7. Bukan begitu?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia. Sesuai dengan (...)

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana mau merambah yang lain, kalau begitu?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, ya, Yang Mulia.

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hakikat suara kuasa kan, begitu?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia. Hanya maksud kami, ini kan, mengenai Dapil Sulsel III, maksud saya setelah surat dimasukkan. Kemudian, ini sudah lapor ke Bawaslu. Oleh Prinsipal kami juga memasukkan surat susulan kepada ketum kami. Saya hanya ingin menjelaskan, izin, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa ternyata bukan hanya salah satu caleg yang dianggap mela ... merugikan Prinsipal kami, maksud saya. Tetapi saya hanya menyampaikan saja, Yang Mulia.

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kami paham. Tapi yang kami mau tegaskan itu bahwa yang Ibu bacakan permohonan tadi itu adalah yang berkait dengan Caleg Nomor 7?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, kan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, sehingga kami tidak bisa mencampuri atau Ibu tidak bisa mencampuri urusan permohonan yang lain yang tidak diserahkan di sini.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau itu nanti secara internal berpengaruh, nah, itu urusan Partai Demokrat. Kan, begitu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, siap, Yang Mulia. Terima kasih.

113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu lho yang saya maksud.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, siap, Yang Mulia.

115. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya Termohon juga dalam memberikan tanggapannya nanti tidak kacau.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak kacau kan? Mana yang harus diinikan, gitu kan? Nanti silakan juga Termohon atau kalau nanti ada Pihak Terkait misalnya yang bersangkutan dengan itu tidak ... tidak dikacaukan anunya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menjadi klir posisinya, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, siap, Yang Mulia.

121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu. Baik.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Boleh saya sampai ... izin menyampaikan ... maksudnya kami kan, ada ... kenapa kami memasukkan Nomor 7? Karena berdasarkan bukti yang kami lampirkan ini bahwa ada banyak TPS di mana Caleg Nomor 7 mendapatkan 100% bahkan di partai-partai lain tidak dapat. Jadi, ini yang sudah ... sudah bukti ... mengapa ... mengapa kami bilang ada dugaan penggelembungan. Jadi kalau seandainya diizinkan memang ... memang kita tidak masukkan ke dalam Petium, tetapi kan, dugaan ini kalau ... apa namanya ... dalam 1 TPS hanya 1 caleg dari 1 partai saja mendapatkan 100%, apakah dimungkinkan untuk melakukan pembukaan kotak suara? Itu saja, Yang Mulia.

123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ibu sudah memasuki pokok persoalan nanti yang akan ada tanggapan Termohon kalau soal itu.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Oke, siap, siap.

125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kita kan, masih mau prosedur formalnya tentang apa yang Ibu bicarakan ini dulu, kan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sehingga klir nanti apa yang harus ditanggapi oleh Termohon, dan Pihak Terkait, dan termasuk juga Bawaslu nanti kalau menyampaikan keterangan yang berkait dengan dalil-dalil tadi, itu lho, maksudnya. Ya?

**128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA**

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

129.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia Pak Suharto.

130.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Eh Ibu, Bu.

**131.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA**

Ya, siap, Yang Mulia.

132.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bu siapa namanya?

**133.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA**

Natalia, Yang Mulia.

134.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini, di dalam permohonan, satu permohonan yang Anda baca tadi, yang di perbaikan yang kami terima sesuai dengan tenggang waktu itu, itu ada 3 permohonan. Termasuk salah satunya Syahrudin, kemudian satu lagi yang berkaitan dengan Gowa.

**135.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA**

Ya, Yang Mulia.

136.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi yang 2 itu kan, tidak Anda baca?

137.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Tidak, Yang Mulia.

138.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak baca. Tapi itu satu permohonan itu? Satu surat kuasa?

139.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

140.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun saya cek juga Anda belum tanda tangan di surat kuasa itu.

141.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Surat kuasa asli sudah, kok.

142.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Di perbaikan? Dicek itu perbaikan yang masih tenggang waktu. Perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, pasti diberi registrasi oleh Mahkamah. Kalau Anda mengajukan beberapa kali perbaikan, tapi tidak ada registrasinya, berarti itu oleh Mahkamah sudah dipandang tidak memenuhi persyaratan.

143.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

144.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi saya cermati yang Ibu baca tadi adalah berkaitan dengan ... Dapil III, Caleg Nomor 7.

145.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

146.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal yang di sebelah Ibu itu. Nah, selebihnya tidak Anda baca. Nah, ini kan, Mahkamah perlu ketegasan karena satu permohonan ini. Yang tidak Anda baca itu merupakan satu kesatuan yang dibaca ataukah dengan sendirinya Anda melepas dengan yang 2 itu?

147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Kami ini terbagi untuk ... apa namanya ... saya kebetulan mendapatkan mandat khusus untuk Pak Bahrum.

148.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Jadi, hanya itu saja yang saya sampaikan.

150.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu juga yang kemudian menjadi persoalan. Kalau Anda mewakili prinsipal, sementara Anda mengatasnamakan DPP, itu nanti ada overlapping dengan bagaimana dengan syarat harus ada izin DPP itu? Ketua umum dan sekjen.

151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, Yang Mulia.

152.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Anda firmid bahwa Anda hari ini adalah mewakili prinsipal secara perseorangan, lengkapi dengan persetujuan atau rekomendasi dari ketua umum. Tapi kalau Anda mewakili DPP, enggak terus mengatakan di persidangan ini bahwa saya mewakili Prinsipal saya ini. Pak siapa (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, ya ya, Yang Mulia. Terima kasih untuk masukannya, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu jadi ini yang 2 dianggap dilepas, enggak perlu ... enggak, enggak, supaya nanti direspons oleh KPU dan bawaslu termasuk Pihak Terkait klir, gitu lho. Ada 3 Petitum yang dalam 1 permohonan yang Anda sampaikan itu. Cuma Anda kan, hanya membaca 1 Petitum berarti hanya minta (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Untuk 1 caleg.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1 untuk prinsipal Ibu itu. Itu saja.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ketegasan itu akan kami catat dalam Berita Acara supaya begitu kami putus bahwa itu berkaitan dengan nomor 7, Caleg Nomor 7 atau sebenarnya kalau Anda mewakili DPP tidak perlu bicara caleg. Bicara perolehan suara dapil terlepas nanti dapil itu secara otomatis kan, akan mengisi. Siapa sesungguhnya yang ada di dapil itu? Itu kan, by system, kan?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu hakikat kenapa ini mewakili DPP ini mewakili perseorangan. Kalau perseorangan itu berbicara tentang orang, kalau DPP berbicara masalah perolehan suara dapil, ya kan?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, siap, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun secara perseorangan pun akan secara otomatis tidak dirugikan karena akan mengisi secara ... kecuali memang ada kebijakan internal partai bahwa ini ada win-win solution yang mengisi adalah yang nomor urut berikutnya. Itu kan internal Ibu yang ... prinsipal ibu lah. Jelas, ya?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya nanti pihak KPU dan pihak yang lain tidak. Itu saja, Pak Ketua.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

168. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, padahal sebenarnya seluruh partai politik itu sudah kami bimtek sesungguhnya. Dan sudah jelas bahkan ada latihannya, bukan hanya sekadar teori, kan? Ini KPU tahu ini. Dan KPU, Bawaslu tahu kami melakukan bimtek itu sudah dilatih. Bagaimana kalau Pemohonnya itu diajukan oleh parpol? Itu kan, sesungguhnya kalau suara parpol itu yang sudah diperjuangkan, otomatislah suara dari siapa anggota parpol yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD kabupaten/kota atau pun provinsi itu kan, otomatis terangkat sehingga sesungguhnya tidak perlu lagi menyebut nama caleg sesungguhnya kalau sudah atas nama parpol.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

170. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebab kalau yang menyebut nama caleg, itu sesuai PMK itu adalah kalau terjadi persoalan di internal partai. Kalau istilahnya jeruk makan jeruk itu, lho. Nah, baru itu yang perlu sesungguhnya nama Prinsipal yang secara perorangan itu karena dua-duanya harus mendapatkan persetujuan dari DPP itu sebenarnya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, Yang Mulia.

172. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ini sesungguhnya tidak perlu lagi harusnya menjadi ... apa namanya ... pembekalan begini ini, ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia.

174. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Yang Mulia, silakan kalau ada tambahan.

175. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya tadi berharap direnvoi, ya. Karena kemarin juga ada hal-hal yang ingin dicantumkan itu. Ketika kewenangan Mahkamah Konstitusi di halaman 4 itu menyebutkan bahwa MK itu salah satu kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Itu benar, enggak?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini pasti waktu pilkada ini kewenangan MK mengadili perkara di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, ya. Itu memang di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi kalau di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di Undang-Undang MK, tidak ada disebut bahwa kewenangan MK di ... apa ... pemilihan umum itu sebelum dibentuk peradilan khusus.

Kemudian yang kedua, ini mengenai objectum litis-nya adalah ya, terkait dengan keputusan KPU mengenai penetapan ... apa ... hasil pemilihan itu disebut sampai 3 kali itu hanya Selasa, pukul 01.46 WIB. Tanggalnya tidak disebut.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Tanggal, izin, Yang Mulia, tanggal 24 Mei, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan, itu yang (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Oh, ya ya, Yang Mulia. Izin (...)

181. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ... apa ... nomor dari (...)

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Halaman 3.

183. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu kan, Selasa 21 Mei kan, ya? Ini disebut Selasa, tapi (...)

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Pukul 01.46 WIB, izin, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, 2 kali jadi (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ini koreksi, mohon maaf, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, tidak usah menyebut hari.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya.

189. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau dulu, ya, biasa di kampung saya itu begitu ditanya tanggalnya, dia sebut hanya musim rambutan saja gitu waktu lahir. Jadi, tolong, ya!

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia. Di tengahnya sudah ada, Yang Mulia, mohon izin, tertanggal 21 Mei pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

191. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Hanya di bawahnya tidak diulang lagi. Ya, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang 2 ada yang tidak menyebut tanggal, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini penting, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Supaya cermatlah, gitu ya. Silakan!

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebelum saya bukti, saya ingatkan lagi Anda belum menyertakan Kartu Identitas Advokat, ya? Di dalam permohonan. Belum ada kami terima itu.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Kemarin semua sudah 1 rangkaian dengan dari DPP. Saya sudah menyerahkan KTA, sudah menyerahkan bus dari awal.

201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi di catatan kami itu belum ada. Nanti tolonglah dicek ke belakang, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Baik, baik.

203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau soal itu.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Nanti kami cek di bagian kesekretariatan. Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu karena berkait dengan kewenangan Saudara duduk di situ.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Memakai jubah hitam itu. Nah, itu.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ada dompetnya (...)

209.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian di surat (...)

210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ada KTA nya bawa kok, Yang Mulia.

211.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan Surat Kuasa Khusus yang asli itu ternyata merujuk Surat Kuasa Khusus untuk Provinsi Aceh.

212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia. Memang waktu itu masuk hanya di sa ... satu dapil karena kami hanya ada 1 SK.

213.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi (...)

214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Yang masuk di situ. Yang lain ...

215.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu kan, enggak bisa berlaku untuk semua. Gimana nanti kalau ... kalau yang anu ... masa ini yang Nangroe Aceh tiba-tiba loncat ke ... mana ini? Ke Sulawesi, gitu? Kan, tidak bisa. Kan (...)

216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia. Nanti akan disangkutkan.

217.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang namanya Surat Kuasa Khusus ... masa saya ngajarin lagi advokat, sih?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

219. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kuasa Khusus itu kan, khususnya itu kan, sangat di-rigid, gitu. Di sangat rigid ditentukan. Apa kekhususan yang di ... diberikan itu, ya. Nanti tolong diini, ya, Bu, dilengkapi ke belakang, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, siap, Yang Mulia.

221. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau sepanjang berkenaan dengan alat bukti, yang ... saya mau cek dulu. Untuk yang berkait dengan Pak Syahrudin itu buktinya itu kan, P-1 sampai dengan P-5, betul?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Untuk yang caleg lainnya (...)

223. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok caleg lainnya? Bagaimana?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Izin, Yang Mulia. Yang ada di dalamnya (...)

225. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oo, yang ibu wakil ini, ya?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Yang ada di dalam sini, saya hanya untuk Pak Bahrum Daido saja.

227. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oo ... Pak siapa?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Bahrum Daido.

229. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Untuk DPR RI, hanya itu saja.

231. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, oke. Pak Bahrum Daido itu ... oh, ya, betul. Berarti bukti P-1 sampai dengan P-26?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, benar?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

235. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Catatan kami di sini adalah bukti P-1 sampai dengan P ... apa namanya ... daftar buktinya itu hanya tertulis P-1 sampai dengan P-24. Jadi, ada 2 lagi yang tidak tertulis di daftarnya, ya?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

237. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, P-25 dan P-26 nya itu tidak ada di daftar bukti? Jadi, mohon itu diperbaiki, ya?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

239. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tambahkan di daftarnya, itu Anda lihat. Itu penting di daftar itu. Kenapa? Karena nanti kan, Anda akan merujuk dengan dalil ini kurung bukti P sekian. Kalau ndak ada bagaimana?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Ya, Yang Mulia.

241. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, siap, Yang Mulia.

243. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu nanti silakan di ... dilengkapi.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

245. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka bukti yang sudah ada fisiknya itu kami sahkan. Dengan catatan bahwa nanti penomorannya itu diperbaiki di belakang karena bukti fisiknya sudah ada, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Siap, Yang Mulia.

247. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Terima kasih, Yang Mulia.

249. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Saya sahkan. Baik, selanjutnya Partai Gerindra. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahid untuk me ... untuk memimpin persidangan untuk Partai Gerindra. Silakan! Terima kasih.

250. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, silakan. Sama seperti yang tadi, sejak kemarin juga sampaikan hal-hal yang pokok, penting. Paling lambat 10 menit. Silakan!

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, pada dasarnya, permohonan kami ini tidak dibacakan secara keseluruhan, ya. Tidak ... tidak dibacakan secara keseluruhan. Lalu, ada beberapa poin yang kami lakukan renvoi. Berhubung karena kami dari Pihak Advokat tidak semua selaku advokat dari partai. Namun, terdiri dari beberapa daerah. Namun, persoalan mekanisme pada saat diajukannya permohonan itu melalui partai. Jadi,

pengetikan dan hal-hal sedi ... sedikit amburadul, Yang Mulia. Jadi, kami akan ... kami akan membacakan di sini dan kami akan tegaskan. Tapi intinya ini bukan pada persoalan yang inti. Terima kasih. Ya, bukan.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Wahid. Anda yang kalau direnvoi yang diregistrasi, ya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan ... jangan keluar yang itu, ya?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, jadi yang direnvoi itu cuma penempatan bukti, Yang Mulia. Penulisan bukti saja.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi berkas permohonan yang diregistrasi?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, yang diregistrasi.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena Bapak ada mengajukan perbaikan juga yang setelah diregistrasi. Apa Bapak, apa tim Bapak? Enggak tahu ini. Tanggal 1 Juli ... tertanggal 1 Juli.

259. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon maaf, tunggu sebentar. Ini masih ada lagi Kuasa Hukum dari Gerindra yang tadi belum masuk yang nanti mewakili DPP. Bapak yang anu perorangan ya, Pak?

260. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya.

261. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Bapak yang perorangan kan?

262. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Prinsipal ditukar.

263. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipalnya Bapak perorangan. Yang dari ... dari DPP Partai Gerindra kabarnya baru akan masuk, kami persilakan nanti dulu. Silakan dulu, Yang Mulia. Bapak dulu yang mempunyai hak untuk (...)

264. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi yang tadi sampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo yang tanggal 1 Juli?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Yang kami akan bacakan di sini, perbaikan permohonan hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 22.37 WIB.

266. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah. Ya, yang ini, ya?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

268. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Yang ini, Yang Mulia. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

270. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau itu enggak usah, lama dibacakan.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

272. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Langsung ke ini saja.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Untuk permohonan Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar Dapil IV ... Dapil Makassar IV ini dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya, dianggap dibacakan, baik posita maupun petitumnya.

Untuk Kabupaten Gowa, DPRD Kabupaten Gowa, Dapil VI ini pun dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dapil II dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk Kabupaten Maros, Dapil I, halaman 14. Halaman 14, saya ... bahwa hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Maros telah mengeluarkan atau mengumumkan Berita Acara Nomor 66/PL01.07DA/7309/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Maros Pemilihan Umum tahun 2019 ser ... tanggal 20 Mei 2019. Bukti P.2/DPRD Kabupaten-II yang tadinya tertulis Bukti P.2, Yang Mulia. Jadi di renvoi menjadi Bukti P.2/DPRD Kabupaten-II.

Yang selanjutnya telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8 ditetapkan melalui keputusan KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 23.08 WIB. Bukti P.2.

274. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pukulnya itu enggak direnvoi?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

276. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk 1 Mei 2019 itu. Bukan pukul 23.0 ... ya, silakan memang (...)

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Direnvoi.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Bukti P.2/DPRD Kabupaten-I.

2. Bahwa namun di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 gar ... TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat serius, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bahwa pihak KPPS Kelurahan Turikale telah mengikutsertakan pemilih yang tidak sah (...)

280. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dianggap dibacakan itu ya, ya.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Ada yang kami renvoi di daerah ... pada wilayah ini, Yang Mulia. Jadi, mohon izin untuk dibacakan.

282. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman (...)

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Jadi, buktinya ini ... pada huruf B angka 1, yang tadinya tertulis Bukti 2 sampai Bukti P.2/DPRD Kabupaten-V menjadi Bukti P.2/DPRD Kabupaten-VII.

284. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kabupaten VII, ya?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Sampai dengan DPRD ... P.2/DPRD Kabupaten-X.

286. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Jad ... yang kedua, pada TPS 010 Bukti P.2/DPRD Kabupaten-XI sampai dengan Bukti P.2/DPRD Kabupaten XIX.

288. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Pada TPS 014, Bukti P.2/DPRD Kabupaten-XX sampai dengan P.2/DPRD Kabupaten-XXVI.

290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Pada TPS 020, Bukti P.2/DPRD Kabupaten-XXVII sampai dengan Bukti P.2/DPRD Kabupaten-XXIX. Sehingga berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Maros Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009 tertanggal 20 Mei 2019 dalam putusannya telah menyatakan terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, KPPS TPS 014, dan KPPS TPS 020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain.

Namun demikian, hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara, pada TPS terlapor sebagaimana ketentuan pasal peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Bukti P.2-DPRD Kabupaten) yang tadinya 28, Yang Mulia, menjadi 30.

292. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

28 direnvoi menjadi 30.

294. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Miknya coba ada jarak dari miknya supaya tidak terlalu (...)

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Angka 3, angka 3 nya itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan! Terus?

297.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

4. Sehingga terbukti pada tanggal 29 April 2019 di saat pileg dilakukan perekapan suara di tingkat kecamatan, namun penyelenggara pemilihan pada tingkat PPK Kecamatan Turikale tidak bisa menghadirkan wujud formulir model A.DPK-KPU dan formulir model C7.DPK-KPU. Mulai dari saat Saksi Partai Gerindra meminta kepada penyelenggara pemilihan pada tingkat PPK Kecamatan Turikale pada saat melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Turikale di Kantor Camat Turikale hingga saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Maros, Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 5 Mei 2019 oleh KPU Kabupaten Maros, bukti P.2-DPRD.Kab.29 itu direnvoi menjadi P.2-DPRD.Kab.04 sampai dengan bukti P.2-DPRD.Kab.05, Yang Mulia.

298.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang Maros?

299.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, P.2-DPRD.Kab.29 direnvoi menjadi P.2-DPRD.Kab.04 sampai dengan bukti P.2-DPRD.Kab.05.

5. Bahkan meskipun KPU Kabupaten Maros telah diperintahkan oleh Majelis memeriksa Bawaslu Kabupaten Maros di hadapan persidangan untuk menghadirkan kotak suara yang berisikan formulir model A.DPK-KPU dan formulir model C7.DPK-KPU, namun KPU Kabupaten Maros tetap tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan wujud dari formulir model A.DPK-KPU dan formulir model C7.DPK-KPU. Bukti rekaman sebagai kesatuan daftar bukti tentang adanya daftar pemilih. Jadi, bukti rekaman tadi, Yang Mulia, mohon izin, itu menjadi bukti 47, Yang Mulia. Bukti rekaman direnvoi menjadi bukti P.2-DPRD.Kab.47 sebagai suatu kesatuan daftar atau bukti tentang adanya daftar pemilih DPK di wilayah Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

300.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, uraiannya tidak ada renvoi, ya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Yang direnvoi buk (...)

302. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau memang banyak renvoi begitu, lebih baik nanti diberikan daftar kita, ya?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia.

Untuk poin a, yang direnvoi Kab.30 menjadi Kab.31, buktinya, Yang Mulia.

Untuk poin b, bukti P.2-DPRD.Kab.31 menjadi P.2-DPRD.Kab.32.

Untuk c, bukti P.2-DPRD.Kab.32 menjadi P.2-DPRD.Kab.33.

Untuk d, jumlah bukti P.2-DPRD.Kab.33 menjadi P.2-DPRD.Kab.34.

Untuk e, untuk bukti P.2-DPRD.Kab.34 menjadi P.2-DPRD.Kab.35.

Huruf f, untuk bukti P.2-DPRD.Kab.35 menjadi P.2-DPRD.Kab.36.

304. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai ke l, begitu?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

G ... naik, naik 1, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, silakan!

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Jadi, sampai di huruf i ... eh ... l, l naik 1.

308. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

P.2-DPRD.Kab.42, jadi P.2-DPRD.Kab.42, ya?

309.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

310.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oke.

311.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia. Sehingga total jumlah keseluruhan pemilih DPK dari 12 TPS di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros adalah 187 pemilih.

Dengan demikian, maka Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di wilayah Pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah mengabaikan Ketentuan PKPU 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 dan ayat (3) huruf c angka 8 bagian c sebagaimana termaktub sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

O. Penyelenggara Pemilu 2019 pada tingkat KPPS telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam suatu petunjuk atau pedoman bagi KPPS sebagai jajaran penyelenggara dari KPU yang diatur secara jelas dalam buku panduan KPPS, Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019. Bukti P.2-DPRD.Kab.42 menjadi P.2-DPRD.Kab.43, Yang Mulia.

P. Namun, oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Maros tanpa didasari dengan pertimbangan hukum dalam fakta persidangan telah menyatakan pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, dan TPS 019 tidak ditemukan pelanggaran administrasi pemilu. Bukti P.2-DPRD.Kab.27 menjadi P.2-DPRD.Kab.30 yang kini telah diajukan koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Maros Nomor 002/ADM/BWSL/MAROS/PEMILU/2009 tertanggal 20 Mei 2019 yang kini kami masukkan menjadi bukti P-30.a, Yang Mulia. Ada bukti tambahan.

312.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di P, ya?

313.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

314.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, buktinya belum dimasukkan? Akan ditambahkan?

315.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Ya, akan ditambahkan, Yang Mulia.

316.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P berapa itu?

317.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

P-30.a, Tanda Terima.

Q. Bahwa dari adanya pelanggaran administrasi pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 telah merugikan dan sangat mempengaruhi perolehan suara dari kursi Pihak Partai Gerindra (...)

318.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengulangan ini (...)

319.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Khususnya, Caleg Nomor Urut 1. Muhammad (...)

320.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sekarang enggak ada ... enggak ada perubahan, kan?

321.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Tidak ada perubahan, Yang Mulia.

R. Bahwa tentang versi hasil dari sertifikat perhitungan suara dari KPU Kabupaten Maros. Pada Dapil I Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Turikale. Bukti P.21 dan P.21A itu direnvoi menjadi Bukti P.2 DPRD-Kabupaten/44 ... Kabupaten 44, Buk ... P DPRD, Bukti P.2DPRD-Kabupaten/Kab45 dan Bukti P.2 DPRD-Kabupaten/45.a, Yang Mulia. Yang juga ditambahkan.

322.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini sebentar, sebelum dilanjutkan. Anda menyampaikan bukti ini tanpa memperbarui dengan bukti yang Anda serahkan. Atau nanti akan ada daftar bukti baru yang menyesuaikan dalil ini? Gimana?

323.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Jadi, seperti yang dibahasakan tadi, Yang Mulia. Jadi, seyogianya bukti kami yang masukkan itu berbeda angkanya ke partai. Cuma (...)

324.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya, Anda ... Anda kemudian menyesuaikan dengan bukti yang diajukan partai itu (...)

325.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

326.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah sama dengan yang diajukan partai?

327.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, ya. Kami menyesuaikan dengan ... apa ... deretan alat bukti, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu yang diajukan partai?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, daftar itu.

330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, Anda tidak perlu memperbaharui lagi daftar bukti yang ... yang diajukan di partai itu?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Sama, Yang Mulia. Cuma diubah saja penempatannya.

332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Cuma ada dua bukti tambahan, yaitu (...)

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eh, nanti di ... di ... anu itu ... di ... apa tersendirilah tambahan (...)

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia, saya.

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya itu siap ya, maksudnya, ya?

337.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia.

338.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Saya. Oke.

339.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Yang telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dan kursi Pihak Partai Gerindra sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2, dan tabel 2 ini direnvoi, Yang Mulia. Dihapus.

340.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tabel 2, tidak ada?

341.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Tidak ada.

342.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, hanya tabel 1 yang dipakai?

343.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Tabel 1.

344.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

345.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Yang Mulia, mohon izin. Jadi, karena di sini sebetulnya ... sebenarnya yang kami masukkan ini, itu dari program xl. Cuma dirubah, akhirnya acak-acakkan dia punya angka dari partai.

346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Karena ini kan, partai, mekanisme partai ini yang ... apa ... sedikit ada ... apalagi kemarin situasi bulan puasa, kami kan, dari ... apa ... dari Advokat daerah, jadi sulit untuk komunikasi, seperti itu.

348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Itu kan, koordinasi saja.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Jadi, kami akan ajukan ini yang pada pokoknya sama, Yang Mulia. Tapi hanya memperjelas angka-angkanya saja. Bisa disampaikan, Yang Mulia?

350. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu renvoi mengenai angka-angka?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Eggak. Pada prinsipnya angkanya tidak berubah.

352. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Cuma untuk mudah dilihat saja.

354. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk memudahkan dilihat?

355.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Untuk memudahkan dilihat.

356.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kalau ternyata kami melihat ada perubahan itu kami pertimbangkan tersendiri, ya?

357.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia.

358.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, baik.

359.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019: JUFRI HAFID

Saya siap.

360.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

361.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Q. Bahwa tentang versi hasil dari sertifikat perhitungan suara dari KPU Kabupaten Maros, pada Dapil I Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Turikale. Jika dikurang dengan jumlah suara pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 pada Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Bukti P.2/DPRD-Kabupaten/42 itu direnvoi, Yang Mulia. Menjadi, Bukti P.2/DPRD-Kabupaten/44, Bukti P.2/DPRD-Kabupaten/Kabupaten-45 dan Bukti P.2/DPRD.Kab.45.A.

362.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu tambahannya, ya?

363.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, Yang Mulia. Jadi, 42 direnvoi.

364.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

365.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Bilamana dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, maka akan terhitung sebagaimana dalam uraian. Tabel 3 dan tabel 4 itu direnvoi, yang Mulia. Menjadi tabel 2 dan 3. Tabel 2 dan 3 sebagai berikut.

366.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, ini Anda poin q kan, tadi sudah ada r sama q di depan. Ini q dari mana datang?

367.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Jadi, pada dasarnya ini, Yang Mulia. Waktu kami masukkan di partai itu tidak ada ... tidak ada ... tidak ada huruf. Jadi, dia terpisah. Cuma, waktu di partai kan, secara akumulasi mereka mengetik. Jadi, kami sampaikan juga sama partai.

368.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi tetap kami berpegangan pada yang Anda sampaikan.

369.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Saya, Yang Mulia.

370.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terlepas Anda itu ada persoalan dengan internal atau tidak.

371.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Saya.

372.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Q ini q apa? Karena sebelumnya sudah ada r dan q. Ini q lagi yang Anda sebut?

373.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Oh, s. Ini direnvoi juga, Yang Mulia. Karena (...)

374.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi s?

375.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

S.

376.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

R, q, s jadinya?

377.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, ya. Q jadi s, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

378.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Urut ...urut enggak, nih?

379.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Terima kasih, Yang Mulia. Diingatkan.

380.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok r, q, s gitu. Mestinya yang di depan tadi s mestinya.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

R, s, t, u. Nah.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gimana ini?

385. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini s-nya?

386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Q, r.

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

s ini?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Q, r, s.

390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

S? Oke.

391.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Lalu, tabel 2 (...)

392.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, tadi sudah.

393.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Terus. Tabel 4 yang kolomnya ini berubah jadi tiga, Yang Mulia. Disesuaikan dengan yang direnvoi tadi.

394.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya kan, 44, 45, 45.a, ini kan?

395.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, Yang Mulia.

396.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah. Langsung dicatat.

397.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

34 diubah menjadi (...)

398.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, tinggal Petitum, tuh.

399.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Petitum, ya?

400.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.
3. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Program Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota di daerah pemilihan Dapil I Kabupaten Maros.
4. Membatalkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020, karena telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Ini ada dari pihak kami sudah me-print, pada intinya sama, tapi paling tidak ini memudahkan untuk dilihat. Tabel tadi, Yang Mulia. Tabel 1, tabel 2, tabel 3.

402. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Excel itu, ya?

403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

404.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Yang ini kami perkecil karena sebenarnya kan, waktu disampaikan di partai, itu excel. Cuma waktu jadi word, dia pecah. Pecah tulisannya.

405.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pecah kongsi dia, ya? Emang perpecahan itu enggak enak, Pak. Jadi, silakan nanti disampaikan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, sepanjang itu tidak mengubah ... apa namanya ... substansi angka yang ada di dalamnya, kami akan terima. Itu memudahkan untuk dilihat, kan?

406.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

407.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya lebih indah juga, ya. Baik, terima kasih. Jadi, itu disampaikan.

408.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya.

409.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Izin, Majelis.

410.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bagaimana?

411.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, Yang Mulia, izin.

412. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih kaitan dengan ini, enggak?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Masih, ya.

414. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, melanjutkan (...)

416. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, Bapak belum berkenalan. Tolong perkenalan dulu, Pak. Karena Bapak datangnya terlambat tadi.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik, terima kasih.

418. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya tidak seperti Pambers itu, "Terlambat Sudah". Jadi, susah nanti. Bagaimana, Pak?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya. Nama saya Syahrone, selaku Kuasa Hukum dari Partai Gerindra yang dalam hal ini mewakili Sulawesi Selatan, Makassar ... Dapil Makassar IV. Yang akan kami mohon izin yang mau kami sampaikan terkait dengan tambahan daftar bukti, sebagaimana tadi permohonannya sudah disampaikan. Sudah dibacakan. Kami ingin menyampaikan ... bermaksud menyampaikan tambahan daftar bukti khusus Kabupaten Pangkajene sama Kepulauan, Dapil II. Untuk (...)

420. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu nanti yang akan Bapak sampaikan?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya.

422. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nantilah.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Maksud saya dalam kesempatan ini kami menyampaikan ada tambahan daftar bukti (...)

424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Khusus untuk Pangkep.

426. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ... itu nanti bisa disampaikan sebelum bersamaan dengan sebelum Bapak membacakan. Saya kira ada kaitannya dengan perubahan ini, enggak?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Tidak ada. Hanya tambahan daftar bukti saja.

428. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah. Jadi, anu ... itu.

429.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Agar supaya diterima.

430.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Nanti, nanti setelah Bapak menyampaikan pokok permohonannya, nanti kan, Bapak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu dulu?

431.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, betul. Saya menyampaikan, Majelis.

432.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang ini Bapak yang tadi yang dari Excel itu ... anu ... itu, yang dari Excel ke Word, ya, Pak?

433.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Jadi, sama yang dibahasakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Pada dasarnya ada tambahan bukti yang akan diajukan dengan Pak Syahrone. Terima kasih, Yang Mulia.

434.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Bapak tetap merujuk ke barang bukti itu, kan?

435.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Tambahan bukti kan, digabung dari semua satu (...)

436.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, artinya Bapak yang disebut di permohonan Bapak merujuk ke itu juga, kan? Ke daftar bukti itu, kan?

437.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya. Masuk juga.

438.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang tadi dijelaskan, Yang Mulia Suhartoyo. Ya. Baik. Itu, ya? Terima kasih. Ada catatan sebelum sampai ke Bapak untuk yang permohonan yang sebelumnya dibacakan dari Gerindra ini. Bapak yang mana itu, ya? Yang di ... tadi, Pak ini, Pak siapa? Untuk Dapil Kota Makassar atau apa?

439.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Kami Dapil untuk Pangkep, Pak ... Majelis.

440.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pangkep ya? Pangkajene Kepulauan?

441.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya.

442.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Dapil II, kan?

443.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya.

444.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, Bapak yang satu ini tadi?

445.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, jadi semalam kami ... apa ... diberi tahu oleh Pihak Advokat partai bahwa itu mereka akan satukan semua bukti-bukti tambahan, termasuk dari Maros.

446.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ya. Saya bukan mau mempersoalkan itu. Yang Bapak bacakan tadi itu untuk yang mana tadi itu?

447.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Maros.

448.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya cuma mau bilang bahwa Bapak menyampaikan itu Bukti P-2 DPRD Kab.1 sampai dengan P-2 DPRD Kab.47 itu sudah lengkap?

449.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Sudah.

450.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, makanya saya mau mengatakan sudah lengkap.

451.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Sudah, sudah.

452.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan cemas dulu, Pak! Saya cuma mengatakan sudah lengkap dan itu kami mau saikan, gitu lho.

453.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Sudah.

454. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, enak saya lihat Bapak tersenyum enak itu saya, gitu. Cuma mau ngecek itu. Ya, jadi sudah lengkap untuk yang Bapak tadi.

Nah, sekarang untuk Gerindra yang partai. Saya persilakan. Jangan semuanya dibacakan Pak, ya! Mungkin yang poin saja.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, terima kasih, Majelis.

456. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Menyambung tadi sudah disampaikan terkait dengan (...)

458. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelum itu, kami silakan kembali ke Yang Mulia untuk ... karena berkaitan dengan Gerindra beliau yang kami persilakan.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, terima kasih, Majelis ... Yang Mulia, terkait dengan Kabupaten Pangkep tadi Pangkajene dan Kepulauan, Dapil II atas nama Pemohon sebagaimana yang sudah dibacakan tadi kami menambahkan terkait dengan daftar bukti tambahan.

Untuk DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dapil II terkait dengan bukti tambahan ini sudah kami siapkan dan sudah diserahkan dari ... di bawah.

Kami menyampaikan ada 11 daftar bukti tambahan yang akan kami sampaikan khusus untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil II sebagaimana yang telah kami sampaikan dan akan kami sampaikan pada saat pengesahan nanti. Hanya itu saja, Majelis.

460. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Daftar ininya daftar ... apa namanya ... daftar buktinya itu ... apa namanya ... sudah Bapak beri penomoran baru, ndak?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Sudah, dari nomor terakhir yang kami sampaikan itu nomor 18, P-18.

462. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nyambung?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Nyambung. P-19.

464. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termasuk dengan yang apa yang dibacakan tadi?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Berbeda, Majelis. Jadi (...)

466. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Berbeda, ya?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Berbeda.

468. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang saya maksud begini, yang Bapak rujuk tadi siapa namanya, Pak? Pak Jufri rujuk itu sudah sesuai dengan daftar bukti yang dibuat itu?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ini bukti (...)

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Jadi, Majelis, untuk Sulawesi ini ada 4. Makassar, kemudian Gowa, kemudian Pangkep, kemudian Maros. Yang rekan kami sampaikan, itu khusus yang dibacakan dan terkait dengan bukti tambahan juga itu untuk Maros.

471. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maros. Nah, tadi kan, Pak Jufri tadi menyampaikan bahwa ada beberapa bukti yang dirujuk yang di dari partai begitu, kan?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, maksudnya gini, Yang Mulia. Kan, semalam dikatakan nanti advokat dari partai akan memasukkan bukti, jadi kami bukti yang tambahan ini semalam kami setor di partai. Saya mungkin pikirnya ada bersamaan di bawah yang 30.a itu dengan 45.a. Kebetulan dibawa juga.

473. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begini saja. Begini saja, kalau memang, Bapak kan, buktinya tersendiri kalau ini, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Saya, Yang Mulia.

475. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau begitu, sesuaikan dengan daftar bukti Bapak saja walaupun misalnya buktinya sama. Kan kalau Bapak itu kan, menyampaikan hal yang lain lagi. Begitu saja.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, ya.

477. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya tidak rumit.

478.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Siap, Yang Mulia.

479.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti mana yang dirujuk ini kan, supaya menjelaskan untuk membacanya, ya?

480.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: JUFRI HAFID

Ya, Yang Mulia.

481.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan?

482.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Untuk Pangkep, kami sampaikan daftar buktinya sebagaimana yang sudah kami serahkan di bawah. Sementara itu, Majelis. Terima kasih.

483.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada hal yang lain lagi, kan?

484.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Belum ada.

485.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi sudah semuanya ini, kan?

486.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Sudah.

487. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

488. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu Pangkep Dapil II, ya?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik, benar, Yang Mulia.

490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi gini, coba yang perhatikan Surat Kuasanya itu, Pak!

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya.

492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Surat kuasanya itu sudah cocok apa belum? Ini kan, ada list nama-nama calegnya itu. Itu gimana itu penjelasannya?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya, Majelis, berdasarkan permohonan dari caleg masing-masing.

494. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Terkait dengan Dapil untuk Sulawesi Selatan memohonkan rekomendasi kepada partai. Kemudian, partai menyusun atau memberikan kuasa yang disampaikan oleh ketua umum dan sekretaris sebagaimana yang disebutkan dan terlampir pada Majelis yang sudah disampaikan

khusus untuk permohonan yang terkait dengan PHPU DPR, DPRD, dan seterusnya.

496.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

497.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Sementara rekan kami mewakili dari Pemohon yang memintakan rekomendasi kepada partai atau dengan kata lain dikatakan sebagai kuasa hukum dari prinsipal langsung.

498.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itu. Ya, cuma kami memerlukan penjelasan itu ada ... begini, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua. Kartu Advokatnya belum dilampirkan.

499.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Lengkap sudah, Majelis.

500.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

501.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Kami sampaikan semua lengkap.

502.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kapan?

503.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Sesuai dengan penyampaian pertama kali.

504.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di catatan kami kok, enggak ada itu. Coba nanti kalau ini dilengkapi Pak, ya!

505.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik, Majelis.

506.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti dilengkapi, ya?

507.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik.

508.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena itu tadi sudah saya ingatkan, itu kan, itu berkaitan dengan kehormatan Anda, officium nobile itu kan, di ininya kan, di jubahnya itu yang akan nampak karena Anda menggunakan itu.

509.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik.

510.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti dilengkapi ya, Pak?

511.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Siap.

512.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu jadi ... baik, dengan demikian, maka untuk Gerindra selesai. Tapi begini, Pak, untuk khusus bukti di Pangkajene dan Kepulauan itu, bukti P2 DPRD Kab. 4 itu, itu di dalam daftar bukti tertulis DB1-

Kabupaten/Kota sedangkan di buktinya itu DC-1 kabupaten/kota. Nanti sekalian dikoreksi, Pak, ya.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik.

514. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di ... di waktu nanti ini.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Ya.

516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekalian dengan mem ... mem ... apa namanya mem ... merenumerisasi lagi itu. Kemudian, P-2 untuk bukti P-2 DPRD Kab. 8, itu dalam daftar bukti tertulis DAA-1 Kelurahan Tabo-Tabo. Sedangkan di bukti fisiknya cuma tertulis DB-1 kab/kota, gitu. Nanti itu disesuaikan. Kemudian, untuk P-2 DPRD yang diberi tanda bukti P-2 DPRD Kab. 9, dalam daftar bukti itu tertulis DA-1 Kelurahan Tondong Kura. Sedangkan bukti fisiknya, DB-1 kab/kota seperti yang tadi itu.

Nah, dari bukti yang disampaikan, bukti ini tentu di luar tambahan yang Bapak sampaikan nanti itu, ya? Jadi, yang tambahan itu belum kami sahkan sekarang. Dari bukti yang sudah diserahkan untuk Pankajene Kepulauan itu, bukti dari P-2 DPRD Kab. 1 sampai P-2 DPRD Kab. 18 itu, selain yang tadi masih ada bermasalah itu, sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Demikian. Dengan demikian, maka untuk Partai Gerindra sudah selesai. Kami lanjutkan dengan partai berikutnya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Dari PDIP siapa yang akan menyampaikan? Langsung ke dalil-dalil yang sudah diklaster ini.

518.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

519.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mengenai Dapil IV.

520.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, baik.

521.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan seterusnya. Silakan!

522.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nanti kami berdua dengan (...)

523.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

524.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Yang Toraja Utara, kami yang dari provinsi dulu, Dapil IV.

Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya, permohonan kami seputar pembatalan SKKPU, khusus untuk suara Partai PDI Perjuangan di Dapil IV bahwa ada perubahan data atau input data dari C-1 ke DAA-1 dan DA-1. Tapi lebih banyak dari C-1 ke DAA-1. Itu terjadi di 3 kabupaten. Itu di Jeneponto (...)

525.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jeneponto.

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Bantaeng, dan Kepulauan Selayar, ya.

527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Jadi, di Kabupaten Jeneponto, suara Pemohon input dari C-1 ke DAA-1 itu berkurang 52 suara. Sementara dari Pihak Terkait dari C-1 ke DAA, bertambah 2 ... 242 suara. Kemudian, di ... untuk detailnya kami ada ... ada tabelnya.

529. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya. Kemudian, di Bantaeng.

531. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Bantaeng.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Perubahan input dari C-1 ke DAA-1, kami sebagai Pemohon kurang 53 suara. Sementara Pihak Terkait (...)

533. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

121.

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Bertambah seratus dua puluh dua ... 121.

535. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Kemudian di Kepulauan Selayar, Pemohon berkurang 17 suara. Sementara dari Pihak Terkait bertambah 105 suara.

537. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

105, ya.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Jadi, intinya kami menghitung bahwa kalau dihitung semua, sebenarnya kami kalau dihitung secara benar, unggul 62 suara.

539. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akumulasinya, ya?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, dibanding dengan Pihak Terkait.

541. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk 3 kabupaten tadi?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Untuk 3 kabupaten tersebut. Kemudian (...)

543. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

62 suara, ya?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Selisih 62 suara lebih unggul da ... dari Pihak Terkait.

545. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Itu saja intinya, Yang Mulia.

547. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, persandingan berikutnya untuk Kabupaten Toraja, ya?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Toraja Utara, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

549. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya ... Kami akan membacakan perolehan suara terkait Kabupaten Toraja Utara, Daerah Pemilihan Toraja Utara III. Bahwa perolehan suara Pemohon, atas nama Antonius Semben adalah sebagai berikut.

Nomor Urut Partai Gerindra, perolehan suara menurut Pemohon=2.558.

551. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian, menurut Termohon=2.558, sama.

553. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian suara Partai PDI Perjuangan=2.557 suara.

555.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

556.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Menurut Pemohon, kemudian menurut Termohon juga=2.557 suara.

557.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

558.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Untuk Partai Hanura=2.527 suara menurut Pemohon. Sementara menurut Termohon=2.579.

559.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, 22 suara ini?

560.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

22 suara.

561.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selisihnya?

562.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura (...)

563. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

22.

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Adalah 22 suara.

565. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan Gerindra tetap?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Dengan Gerindra, 1 suara.

567. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1 suara?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

1 suara. Kami=2.557, Gerindra=2.558. Jadi, ada 1 suara.

569. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian, Yang Mulia, kekurangan perolehan suara Pemohon, disandingkan dengan suara Partai Gerindra dan Partai Hanura, disebabkan karena adanya penambahan atau penggelembungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, khususnya di TPS 009 Lembang, Tondon Sibata. Lembang itu desa.

571. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dugaan argumentasinya ini?

572.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Dugaannya, ya, ya.

573.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari suara 22 tadi?

574.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

22 tadi, Yang Mulia.

575.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini argumentasinya? Oke.

576.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik, itu ada kami lampirkan bukti (...)

577.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

578.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

P dengan kode P-5.

579.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P-5.

580.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian, daftar pemilih. Ini uraiannya, Yang Mulia.

581.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Daftar pemilih tetap, hasil perbaikan, atau DPTht-2 yang kami lampirkan dalam bukti P-6, di TPS 009 Lembang atau Desa Tondon Sibata tersebut adalah 2.504... 254 pemilih. Kemudian, satu orang pemilih adalah pengguna hak pilih dalam DPK menurut C7-DPK.KPU sehingga jumlah pemilih di TPS 009 tersebut adalah 255 pemilih.

Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD yang kami lampirkan dalam Bukti P-7 dan P-8, bahwa di TPS 009 Lembang, Tondon Sibata, Kecamatan Tondong Kabupaten Toraja Utara adalah 255 pemilih atau 100% pemilih menggunakan hak suara.

Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura atas nama Caleg Agustinus Peleng di TPS 009 tersebut, dikarenakan adanya pemilih dugaan ... pemilih yang tidak berhak. Bahwa dari seluruh jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan yang kami sebutkan tadi di Kecamatan Tondon Sibata, 51 surat suara seharusnya tidak tercoblos.

583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seharusnya tidak?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Seharusnya tidak tercoblos, 51 orang. Kenapa ti ... seharusnya tidak tercoblos sebab 4 orang dari daftar pemilih perbaikan tersebut, dinyatakan sudah meninggal atas nama:

1. Bane dan seterusnya sampai dengan Telsa Bira, ada nomor urutnya di DPT. Kemudian juga ada jenis kelaminnya. Empat orang dari 55 it ... 51 itu sudah meninggal (...)

585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Empat orang di antara 51 itu. Kenapa 51 mestinya tidak tercoblos?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian ada 47 di belakangnya, empat orang itu kami buktikan ada P-9 sampai P-11.

587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian (...)

589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu yang empat itu ke mana suaranya?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Tidak tahu, Yang Mulia.

591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan-jangan sudah merupakan bagian dari PDI punya juga.

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Belum tahu, Yang Mulia.

593. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah, lanjutkan!

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian 47 orang daftar pemilih tetap, 47 orang itu dinyatakan tidak berdomisili di ... di TPS 009 pada hari pencoblosan.

595. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kam ... mulai dari (...)

597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi dicocokkan dengan C-7, enggak?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Nanti kita cocokkan (...)

599. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan, boleh orang tidak harus mencoblos di tempat domisili. Persoalannya kan, begitu?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Betul, Yang Mulia. Cuma karena 100 (...)

601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada argumentasi itu ada?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Karena serat ... kalau 100% sementara ada yang tidak hadir, itu menjadi persoalan, Yang Mulia.

603. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Untuk pencoblosan, sementara ada yang meninggal itu ilogic.

605. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kemudian ada ... yang meninggal itu ada namanya, Yang Mulia. Satu ... nomor 1 adalah Ondong, nomor urutnya di DPT adalah Nomor Urut 1, jenis kelaminnya P.

607. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu meninggal apa, apa itu?

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ini yang ... pemilih yang tidak berada di lokasi pada saat pencoblosan.

609. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Anda sebut dengan meninggal tadi. Padahal yang meninggal yang empat di atas tadi, kan?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Yang meninggal empat orang tadi, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kami mohon maaf, ada satu nanti yang kami renvoi, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Itu pada Nomor 4, atas nama Fatimah.

615. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fatimah?

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Fatimah itu nomor urutnya di DPT adalah Nomor 33 (...)

617. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah bekerja di Malaysia?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ya. Merantau di Malaysia. Yang kami renvoi cuma satu huruf, Yang Mulia.

619. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lainnya tetap? Itu di (...)

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Yang lainnya tetap, satu huruf itu adalah (...)

621. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, direnvoi apa ini?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kenapa, Yang Mulia?

623. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fatimah Anda ren ... renvoi apa?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Renvoi satu huruf, tapi sangat substansi, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dikeluarkan atau maksudnya apa?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Bukan. Hurufnya satu diubah, L di situ, Yang Mulia. Jenis kelaminnya L. L itu kode untuk laki-laki, seharusnya perempuan.

627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, P? Oh.

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Harusnya P. Jadi sangat substansi sebenarnya, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kami belum anu ... Yang Mulia. Tapi informasinya dari tim di sana, Yang Mulia. Jadi, 47 orang tersebut dinyatakan tidak berdomisili di lokasi TPS 009 di Lembang Tondon Sibata tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim yang kami muliakan, berdas ... bahwa pencoblosan terhadap 51 surat suara pemilih yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan tidak berdomisili di TPS 009 Lembang Tondon Sibata tersebut oleh karenanya harus dinyatakan PSU di (...)

631. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar ya, ini klarifikasi. Kalau orang mencoblos pun kan, sebenarnya C-1 nya enggak menyebut nama, toh? Kok, tahu bahwa ada C-1 atas nama ini-ini yang sebenarnya orangnya tidak ada di sini?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ya, persoalannya itu ketika 100% tadi itu, Yang Mulia. 100% (...)

633. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kemudian mencurigai orang? Yang 47 ini (...)

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Apakah ... apakah suara yang 47 orang yang tidak ... tidak berdomisili di situ kemudian ada empat orang yang meninggal, terus siapa yang menggunakan?

635. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ada DPTb, kalau ada suara tambahan gimana?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ada satu suara, Yang Mulia. Betul. Dan kita akui itu ada satu tambahan (...)

637. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah nanti KPU ini. Ini agak krusial ini supaya ditanggapi. Oke, Pak, lanjutkan, Pak!

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik, terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa ... bahwa apabila tidak dilakukan pemungutan suara di TPS 009 tersebut, maka perolehan suara Pemohon adalah 500 ... 2.557 dikurangkan dengan perolehan suara Pemohon di TPS 09 Lembang Tondon Sibata sebanyak 46. Maka jumlah perolehan suara Pemohon adalah 2.511. Sedangkan perolehan suara Partai Golkar sebagai berikut=2.579 dikurangkan dengan perolehan suara mere ... suara di TPS tersebut 200 ... 201 sehingga jumlahnya adalah 2.378. Dengan demikian, Pemohon jelas akan mendapatkan satu kursi untuk DPRD Kabupaten Toraja Daerah Pemilihan III karena perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dengan adalah ... dengan Partai Hanura adalah 3 ... adalah 22 suara. Demikian, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, sampai (...)

640.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Kami mohon renvoi, Yang Mulia. Kami mohon renvoi satu lagi.

641.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

642.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Oh, ya, betul. Tidak jadi renvoi, Yang Mulia. Cukup.

643.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

644.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar dulu. Tadi itu Anda ... sebenarnya itu Hanura apa Golkar? Di teksnya, *Golkar*, ditulis itu.

645.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Golkar, Pak.

646.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang halaman 18 itu, lho, "Sedangkan perolehan suara partai Golkar adalah sebagai berikut."
Itu Hanura apa Golkar itu?

647.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Golkar, Yang Mulia.

648.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang 812?

649.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

2.579 itu Hanura. Mohon maaf. Hanura, ini yang kami renvoi satu lagi, Yang Mulia.

650.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya itu. Jangan serempet. Nanti Golkarnya marah nanti.

651.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ya. Hanura, Yang Mulia.

652.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 18.

653.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Di awalnya tadi kami mau menyampaikan Hanura.

654.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bukan di awalnya. Justru karena itu ndak cocok dengan yang di awal, kan?

655.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik.

656.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 18 ini, ya? Jadi yang benar Hanura, ya?

657.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ya. Halaman 18 itu direnvoi menjadi Partai Hanura. Terima kasih, Yang Mulia.

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Langsung ke Petitum?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya. Terima kasih. Sebelum kami membacakan Petitum, diinformasikan bahwa daftar bukti berikut bukti yang awal sudah diserahkan itu dicabut untuk mempermudah Majelis, diganti dengan yang baru, sudah diserahkan.

660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu mengubah esensi substansi, nggak?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Tidak sama sekali.

662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fisiknya? Nggak?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Tidak.

664. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa kemudian alasan Anda mengubah kalau begitu?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Karena belum tersusun rapi karena terbatas waktu sehingga diperbaiki (...)

666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, baik ... baik nomor maupun fisiknya tidak berubah?

667.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Tidak berubah, Yang Mulia.

668.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ini berkaitan dengan verifikasi, kan?

669.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Betul. Seperti ini yang terbaru dan sudah ditarik yang lama untuk mempermudah Majelis, kita ... kita masukkan yang baru saja.

670.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ditunjukkan (...)

671.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ini yang sudah kami serahkan minggu lalu kalau nggak salah. Nah, satu lagi hal bahwa untuk (...)

672.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti di ... di ... itu urusan lain, biar Petitem selesaikan dulu.

673.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya.

674.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayo, Pak! Petitemnya diselesaikan dulu!

675.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, jadi dengan bukti yang ... maaf, Yang Mulia, bukti yang baru ini hanya menambah ... sori, tidak mengubah sama sekali, hanya menambah bukti arti ... yang kami dalilkan itu buktinya lebih banyak.

676. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Walaupun tidak mengubah apa-apa.

678. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Baik, selesaikan dulu permohonannya! Petitumnya!

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan:
 - 2.1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sula ... Sulawesi Selatan IV atau Dapil IV
 - 2.2 DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan Toraja Utara 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.
 - 3.1 Perolehan suara Pemohon Part ... Partai Politik/Calon anggota DPR dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3.1.1 Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, Nomor 1, Partai PDI Perjuangan=21.752 suara, yang kedua, Partai PAN=24.690 suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil III yaitu di TPS 009, Lembang, Desa Tondon Sibata, Kecamatan Tondon, Kabupaten Sulawesi Utara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Itu Petitem, Yang Mulia.

680. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ini supaya ditetapkan angka ini, jadi bergeser antara yang Hanura ke PAN itu maksudnya ini? Kan, banyak ... masih banyaknya PAN yang akhirnya Anda usulkan. 690 dengan 7 ... oh, sori. Ya, banyaknya PDI, sori. 752 dengan 690, ya?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Jadi ada kesalahan input.

682. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke.

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Yang di PPK-nya.

684. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ada catatan dari Kepaniteraan untuk PDIP, Surat Kuasa hanya ada fotokopi saja, tidak dilampirkan yang asli.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya.

686. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kartu advokat juga belum.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Untuk kartu advokat nanti akan disusulkan, Yang Mulia. Kalau Surat Kuasa Asli, berhubung ini kita kan, atas nama partai, sekarang posisinya ada di Majelis Kepri. Yang asli.

688. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Majelis Kepri?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, di Majelis Kepri. Ada. Sudah masuk. Ya. Betul. Karena kan, kita khususnya untuk pembatalan SK KPU yang sama.

690. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya seperti itu bisa dilapis dengan dilegalisir saja, Pak.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Oh, gitu. Baik. Kalau memang ada (...)

692. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya kan, begitu.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Dilegalisir di bawah gitu, ya?

694. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Oh, ya. Baik.

696. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa ini sudah sesuai dengan aslinya.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

698. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

699. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Saya yang untuk ini ... Saudara, untuk ini catatan mengenai bukti, ya?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

701. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mengenai bukti yang sepanjang untuk menyangkut Kabupaten Toraja Utara itu P-1 sampai dengan P-26, ya? Benar?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Betul, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

703. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah lengkap, jadi kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Kemudian untuk yang ... untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan IV, itu Saudara mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-201?

704.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Betul, Yang Mulia.

705.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang nanti yang mau diurut, ya?

706.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, itu yang terbaru yang sudah disusul.

707.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nah, mudah-mudahan yang terbaru ini tidak mengandung persoalan-persoalan seperti yang lama ini karena P-22 dulu belum dileges.

708.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, sudah semua sekarang.

709.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Terus yang ... sekarang sudah dileges?

710.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Sudah. Sudah diserahkan, 1 bundel ini sudah diserahkan.

711.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, maksudnya itu yang ada catatannya. Ya, ini yang ... jadi kalau yang diserahkan kan, belum sempat kami verifikasi, tapi ini catatannya?

712.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Oh, baik.

713.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti dicek saja dulu, ya?

714.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

715.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk daftar bukti Nomor P-96 itu di daftar buktinya tertulis C-1 Plano TPS 003 Kecamatan Bangkala, sedangkan bukti fisiknya itu adalah C-1 Plano TPS 09 Kalimpora?

716.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Kalimporo. Ya, baik, baik.

717.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu P-96?

718.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya.

719.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, P-114 ada catatan dari Panitera (...)

720.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya.

721.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dalam daftar bukti tertulis C-1 Plano TPS 007 Kecamatan Turatea itu C-1 di ... tapi bukti fisiknya itu C-1 Plano TPS 4 Kecamatan Rumbia.

722.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

723.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Turatea sama Rumbia itu bertukar tempat dia di situ.

724.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

725.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, P-143 dalam daftar bukti tertulis C-1 TPS 007, ini kayak James Bond ini, ya, itu Kecamatan Eremerasa.

726.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya.

727.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedangkan bukti fisiknya itu TPS ... C-1 TPS 09 Kecamatan Eremerasa. Jadi, ini TPS-nya yang beda.

728.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

729.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi itu 007 ini 09, itu kelu ... Eremerasa, Kelurahan Ulugalung, itu.

Kemudian, bukti P-153 itu di daftar bukti tertulis P-153 dalam daftar bukti tertulis C-1 TPS 005 Kecamatan Pajukukang, sedangkan bukti fisiknya itu C-1 TPS 013 Kecamatan Pajukukang, Kelurahan Pajukukang. Jadi, Pajukakangnya sama, TPS-nya yang beda.

730.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

731.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, dari kuasa ... yang tertulis di daftar bukti 005 di fisiknya ternyata 013. Itu catatan dari kami, nanti mohon dicek (...)

732.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

733.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di belakang setelah persidangan ini (...)

734.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

735.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selebihnya selain yang kami berikan catatan itu sudah kami verifikasi dan kami sahkan.

736.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Baik.

737.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

738.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: M NUZUL WIBAWA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

739.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Menurut laporan Panitia ada Pihak Terkait untuk Partai Persatuan Pembangunan yang baru datang, ya? Silakan, Bapak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Untung belum lewat waktu, ya.

740.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon maaf sebelumnya karena ada kekeliruan jadwal, jadi terlambat datang. Saya dari Pihak Terkait atas permohonan PPP dari Partai Bulan Bintang untuk Perkara 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Takalar I.

741.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

742.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Saya Irvan Maulana. Terima kasih.

743.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ya, terima kasih, Bapak sudah hadir. Ya. Nah, untuk surat kuasanya dari Pihak Terkait, Bapak belum menyerahkan, ya?

744.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Untuk surat kuasa baru 1 rangkap yang asli. Cuma tadi sudah diurus yang 3 rangkap, sudah diserahkan tadi.

745.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum ... belum tiba pada kami?

746.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Oh, ya, barusan, Yang Mulia.

747.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kalau difotokopi jangan lupa dilegalisir, ya, Pak, ya?

748.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Ya, baik.

749.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya ini, ya.

750.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 110/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRVAN MAULANA

Baik.

751.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu disampaikan. Baik, terima kasih. Silakan, yang terakhir untuk Partai Persatuan Pembangunan!

752.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya, Angga Brata Rosihan dan rekan saya, Tantri Maulana. Untuk permohonan Partai Persatuan Pembangunan ada 2 dapil, Yang Mulia.

Pertama, Dapil Sulsel III ... Sulawesi Selatan III. Kemudian, Takalar, Yang Mulia. Nanti kami bacakan bergantian dengan rekan kami, Yang Mulia. Kami langsung dari pokok permohonan, Yang Mulia.

753.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung Dapil III Sulawesi Selatan itu.

754.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

4.1 Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan III. Tabel 1 persandingan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

Untuk Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)=262.589. Partai Persatuan Pembangunan=72.079. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah penetapan KPU provinsi dan dilanjutkan dengan keputusan KPU, perolehan suara PPP telah berkurang. Sedangkan, suara Partai Nasdem bertambah. Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota. Poin 2.

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem terlihat jelas di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada Model C-1 Plano dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah Calon Partai Nasdem ber ... sejumlah=31. Namun Model C-1 Plano DPR berbeda. Dengan hasil scan model C-1 yang di-upload di Situng KPU dimana tertera jumlah suara sah partai politik dan Calon Partai Nasdem sebanyak=731. Total perolehan suara sah Partai Nasdem ini berbeda jauh dengan total daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Tagari Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, yakni 244 pemilih.

Dari hasil ini diketahui terjadi penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak=700. Bukti P-3 dan Bukti P-4, Yang Mulia. Poin 3 kami anggap dibacakan. Poin 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tana Toraja sebanyak=5 suara. Adapun seharusnya suara Partai Nasdem sebanyak=873 suara berdasarkan C-1. Namun, terjadi penambahan suara menjadi=878 berdasarkan DB-1, Bukti P-8.

6. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja sebanyak=70 suara. Adapun seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak=880 suara berdasarkan C-1. Namun terjadi penambahan suara menjadi=950 berdasarkan DB-1, Bukti P-19 ... P-9.

7. Bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja sebanyak=2 suara. Adapun suara seharusnya, Partai Persatuan Pembangunan adalah sebanyak=27 suara berdasarkan C-1. Namun terjadi pengurangan suara menjadi 25 berdasarkan DB-1 Bukti P-10.

8. Bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebanyak=11 suara. Adapun suara Partai Persatuan Pembangunan adalah sebanyak=136 suara berdasarkan C-1. Namun, terjadi pengurangan suara menjadi=125 berdasarkan DB-1, Bukti P-11.

9. Bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tana Toraja sebanyak=2 suara. Adapun seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak=19 suara berdasarkan C-1, namun terjadi pengurangan suara menjadi 17 berdasarkan DB-1, Bukti P-12.

10. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Gandang Batu Silanan Kabupaten (...)

755.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Itu kira-kira modulusnya samalah, ada penambahan, pengurangan itu, ya?

756.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Ya, sama itu.

757.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi itu mungkin tidak perlu dibacakan semua.

758.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik.

759.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena ini kan, Anda sudah klir menyebutkan di sini, bahkan menunjuk buktinya, gitu ya?

760.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Ya, Yang Mulia. Benar.

761.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, langsung saja ini ke halaman 8 itu yang persandingan perolehan suara itu.

762.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik.

763.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk kabupaten (...)

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Untuk yang halaman 8, Kabupaten Takalar dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

765. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dapil I Kabupaten Takalar, persandingan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil I Kabupaten Takalar, menurut Termohon dan menurut Pemohon. Menurut Termohon, Partai Persatuan Pembangunan=2.991 dan menurut Pemohon=2.995. Maka terjadi selisih pengurangan sekitar=4 suara. Menurut Termohon Partai Bulan Bintang=3.024 suara dan menurut Pemohon=2.965. Sehingga terjadi penambahan suara selisih 59 suara. Bahwa setelah penetapan KPU Kabupaten Takalar dan dilanjutkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Termohon perolehan suara Pemohon Partai P3 telah berkurang sedangkan suara Partai Bulan Bintang bertambah. Adapun terjadi selisih suara yang terjadi di beberapa TPS sebagaimana tersebut di bawah ini.

767. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, TPS ini disebutkan TPS-nya saja.

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Oke. Baik, Yang Mulia.

769. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

TPS desa (...)

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

TPS 1 ... TPS 2 Desa Moncongkomba. TPS 3 Kelurahan Jaya, Kecamatan Pulau Bangkeng. TPS 3 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan

Patalasang. TPS 1 Kelurahan Kalabbirang. TPS 5 Kelurahan Pattene. TPS 2 Desa Parang Baddo. TPS 10 Kelurahan Pattallassang. TPS 4 Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patalasang. TPS 2 Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang. TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Patalasang dan TPS 1 Kelurahan Canrego, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan.

Bahwa berdasarkan TPS 4, Desa Lasang, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, mohon izin, Yang Mulia. Bawaslu ini kami renvoi menjadi Panwascam, Yang Mulia. Ini kesalahan ketik, Yang Mulia.

771. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Panwascam.

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Panwascam. Rekomendasi berdasarkan Panwascam Kabupaten Takalar.

773. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Panwascam kabupaten?

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Panwascam Kecamatan Takalar, Yang Mulia.

775. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecamatan Takalar?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Kecamatan Takalar.

777. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terus?

778.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Menyelenggarakan pemilihan suara ulang (...)

779.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dahulu! Takalar itu bukannya kabupaten? Ada Kecamatan Takalar juga?

780.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ada ... ada, Yang Mulia.

781.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya ... oh, ya. Silakan!

782.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Kecamatan ... Kecamatan Polombangkeng, Yang Mulia.

783.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, silakan!

784.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Bahwa berdasarkan rekomendasi panwascam Kecamatan Takalar menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU), pemilihan suara ulang tersebut hanya untuk Pemilihan Presiden yang dilaksanakan 27 April 2019, namun pada saat pemilihan tersebut terdapat 2 orang pemilih menggunakan e-KTP atau KTP elektronik diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara capres, DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Bahwa ... bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 Kecamatan Polombangkeng Utara. Bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 Kecamatan Polombangkeng Selatan, bahwa terdapat ketidaksamaan Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 Kecamatan Pattallassang dan bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C-1 dan Formulir DB-1 Kabupaten Takalar.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan rekan kami, Yang Mulia.

785.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Petitemnya, ya.

786.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau kepada siapa pun yang terlibat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pemilu Tahun 2017.
3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8/KPT tentang penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Dapil Sulawesi Selatan III:

1. Partai Nasional Demokrasi=257.571
2. Partai Persatuan Pembangunan=85.079
3. Untuk Dapil Kabupaten Takalar, Dapil I.
Perolehan suara partai, partai politik, PPP menurut Termohon=2.991, menurut Pemohon=2.995, selisih 4 suara. PBB menurut Termohon=3.024, menurut Pemohon=2.965, selisih 59 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, M. Hadrawi Ilham, Angga Brata Rosihan, Tantri Maulana, S.H, M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

787.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Anda tidak ada renvoi untuk bagian petitem ini?

788.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Tidak, Yang Mulia.

789. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, sebentar, sebentar! Bapak, tolong dikasihkan ... anu ... miknya, Petugas! Halaman 10, apa itu?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Halaman 10 tadi mungkin penegasan saja penyebutan Nomor 1 bahwa di TPS 4 Desa Lassang itu tertulis berdasarkan rekomendasi Bawaslu di renvoi menjadi Panwascam Kecamatan Polombangkeng Utara.

791. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, Polombangkeng?

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Polombangkeng Utara.

793. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Polombangkeng itu, kan?

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Ya.

795. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi Kabupaten Takalar?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

797. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu tadi yang saya tanya. Memang ada Kecamatan Takalar? Katanya ada. Kabupaten?

**798.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD**

Terima kasih, Yang Mulia.

799.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, ya?

**800.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD**

Ya. Itu saja.

801.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selebihnya tidak ada renvoi, ya?

**802.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD**

Tidak ada, Yang Mulia.

803.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada renvoi?

**804.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD**

Tidak.

805.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

**806.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD**

Mohon izin, Yang Mulia.

807.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa itu?

808.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Kami ada penambahan bukti.

809.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, nanti.

810.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti ... nanti.

811.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Oh, terima kasih.

812.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

813.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ada koreksi sedikit mengenai petitum Anda kan, di dalam perbaikan Dapil I tidak ada, tapi di permohonan awal ada. bagaimana? Akhirnya yang dipakai perbaikan?

814.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Yang perbaikan, Yang Mulia.

815.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil Sulawesi Selatan I, ya? Ini tidak ada, ya?

816.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada.

817.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Yang Sulawesi Selatan I tidak ada. Yang Sulawesi Selatan III, Yang Mulia.

818.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

819.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Sulawesi Selatan III.

820.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau (...)

821.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti ini yang perbaikan yang baru.

822.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kartu Advokat juga belum dilampirkan.

823.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik.

824.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti diingat, ya.

825.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik, Yang Mulia.

826.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

827. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini ... Pihak Terkait untuk Nasdem ada, ya? Untuk ini, ya? Ada? itu ... Bapak belum tanda tangan Surat Kuasa? Ha? Ndak, Surat Kuasanya tadi belum ada tanda tangannya. Coba belum semua maksudnya, ya? Nanti dicek ke belakang, Pak, ya? Ya, toh? Nah, itu yang mau kami tanya, dia masih tetap sebagai kuasa apa tidak? Tidak lagi? Oh, berarti yang dua ... yang dua itu tidak ... belum tanda tangan itu memang sudah bukan kuasa? Tapi di perkara lain? Di perkara lain masih? Jadi, mohon dicatat Panitera, ya? Jadi untuk Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, kuasa dari Partai Demokrat, Pak, ya? Eh sori, Partai Nasdem ... Nasdem, maaf, dari Partai Nasdem, 2 orang itu tolong ditegaskan siapa saja, Pak, yang dimaksud? Harianto (ucapan tidak terdengar jelas), Eri Kurnia Sihombing, it ... itu yang tidak ikut?

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Satu lagi, Saat Tambunan.

829. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saat Tambunan yang ... jadi 3 orang itu yang tidak ikut untuk (...)

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Tidak ikut (...)

831. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kuasa Pihak Terkait dalam permohonan Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, begitu ya?

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

833. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, kami itu saja. Untuk Saudara Pemohon, ada beberapa catatan saya, sepanjang untuk DPR RI ... bukti untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dari P-1 sampai P-23 yang ada, terlepas dari ada tambahan ya, itu sudah lengkap dan kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Dapil I Kabupaten Takalar, Anda mengajukan bukti dari P1- sampai dengan P-19. Tapi ada catatan di sini, bukti fisik untuk P-14 nya belum ada, nanti sekalian dilengkapi ketika mau ini. Kemudian, ini ada perbedaan daftar bukti dengan bukti fisik, yaitu untuk P-15. Dalam daftar bukti tertulis C-1 per-TPS tingkat Kecamatan Mappak, P-15, ya? Sedangkan bukti fisiknya itu ternyata DAA-1 Kelurahan Parang Baddo, Kecamatan Polombangkeng Utara.

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Kami perbaiki, Yang Mulia.

835. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perbaiki. Satu lagi catatan untuk P-16, di daftar bukti tertulis C-1 per-TPS Kecamatan Makale Selatan, di daftar ... di fisiknya itu ternyata DAA-1 Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan itu. Jadi, di luar itu, di luar P-15 dan P-16 itu, dan P-14 yang tidak ada bukti fisiknya, buktinya sudah lengkap dan kami verifikasi dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Sedangkan nanti alat bukti tambahan yang akan Saudara sampaikan, silakan saja nanti di ... belum bisa kami serahkan sekarang karena harus kami verifikasi terlebih dahulu.

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Terima kasih, terima kasih (...)

837. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu ya? Nanti disampaikan bersama Panitera saja setelah persidangan ini, ya?

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGA BRATA ROSIHAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

839. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian persidangan untuk gelombang keberapa ini ... gelombang dua, ya? Untuk gelombang kedua ... untuk kloter kedua pada pagi hari ini sampai siang hari ini sudah selesai dan kami sampaikan pengumuman. Pertama, sebelum saya diingatkan lagi oleh Pihak Terkait ataupun Termohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait serta keterangan Bawaslu, itu perbaikannya maksudnya, itu bisa diajukan paling lambat ... paling lambat 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, ya? Keterangan Termohon ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, itu diajukan paling lambat 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB.

Sedangkan untuk pemeriksaan persidangan untuk perkara ini, yaitu untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti dari pihak-pihak tersebut, itu akan dilaksanakan pada hari Selasa, tolong dicatat, pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. Pengumuman ini atau pernyataan ini sekaligus berlaku sebagai panggilan sidang, ya? Jadi, nanti tidak ada alasan Saudara-Saudara tidak datang dengan alasan tidak mendapatkan ... tidak mendapat panggilan sidang walaupun kami tetap ini biasanya akan tetap menyusul dengan panggilan sidang juga, tapi ini sekaligus dianggap sebagai panggilan sidang. Saya ulang lagi, Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.00 WIB untuk pemeriksaan persidangan, memeriksa atau mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari mereka itu, demikian ya. Baik, dengan demikian, maka sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.